

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021 – 2026**



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KOTA BALIKPAPAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026. Secara substantif, Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan sejalan dengan Visi Wali Kota Balikpapan terpilih yaitu "Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman".

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 ini merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang menggambarkan strategi dan kebijakan umum serta tahapan program, kegiatan, dan sub kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Balikpapan. Pembangunan Kota Balikpapan diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing, maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui peningkatan gemar membaca.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 diharapkan menjadi acuan kerja bagi semua para pihak, terutama unsur pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Acuan dan pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan program peningkatan mutu dan kinerja kapasitas kelembagaan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam bidang pengelolaan dan layanan perpustakaan dan arsip.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan ini diharapkan dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan melalui partisipasi aktif dalam mengawal dan menopang semua kegiatan dan program pembangunan dan pelayanan bidang perpustakaan dan kearsipan.

Balikpapan, 2 Desember 2021
**Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kota Balikpapan,**



HASANUDDIN
Pembina Tingkat I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	1
PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	10
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.1.1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	10
2.1.2. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas	11
2.1.3. Tugas dan Fungsi Sekretariat	11
2.1.4. Tugas dan Fungsi Bidang Perpustakaan.....	12
2.1.5. Tugas dan Fungsi Bidang Kearsipan	13
2.1.6. Struktur Organisasi.....	14
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.2.1. Sumber Daya Manusia	16
2.2.2. Sarana dan Prasarana	17
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4.1. Tantangan.....	23
2.4.2. Peluang.....	24
BAB III	25
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	25
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
3.1.1. Identifikasi permasalahan Perpustakaan	25
3.1.2. Identifikasi Permasalahan Kearsipan.....	26
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27

3.3.	Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	35
3.3.1.	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	35
3.3.2.	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	38
3.4.	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	39
3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis	40
	BAB IV.....	44
	TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Arsip	44
	BAB V.....	45
	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
	BAB VI.....	47
	BAB VII.....	52
	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	52
	BAB VIII	54
	PENUTUP.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	16
Tabel 2. 2 Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	16
Tabel 2. 3 Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	16
Tabel 2. 4 Kondisi Eksisting SDM Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Per 1 Oktober 2021.....	17
Tabel 2. 5 Ruang Pelayanan Perpustakaan.....	17
Tabel 2. 6 Ruang Pelayanan Arsip.....	18
Tabel 2. 7 Asset/Modal yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	18
Tabel T-C.23. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2016-2020	21
Tabel T-C.24. 1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2016-2020.....	22
Tabel 3. 1 Permasalahan Perpustakaan	25
Tabel 3. 2 Permasalahan Kearsipan.....	26
Tabel 3. 3 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	31
Tabel 3. 4 Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	37
Tabel 3. 5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.....	41
Tabel T-C.25. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	44
Tabel T-C.26. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	45
Tabel T-C.27. 1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Balikpapan	48
Tabel T-C.28. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	52

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

- Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 5 (lima) tahun
- Renstra Perangkat Daerah adalah acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah
- Renstra Perangkat Daerah adalah acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal
- Renstra Perangkat Daerah diwajibkan menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Kementrian/Lembaga

Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah:

- a. Memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas, baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang
- b. Dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai
- c. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas
- d. Menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak lain
- e. Mempermudah pencapaian target, strategi, dan penggunaan sumber daya

Tata cara atau proses penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Persiapan
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD
3. Rancangan Renstra perangkat daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda Litbang untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD
4. Verifikasi Renstra oleh Bappeda Litbang, disertai saran dan rekomendasi
5. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

6. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

7. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra perangkat daerah harus sesuai RPJMD. Sasaran RPJMD setelah diterjemahkan kedalam strategi dan program Perangkat Daerah harus terhubung dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan Perangkat Daerah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.

Renstra Perangkat Daerah juga harus diselaraskan dengan Renstra Kementerian Lembaga (K/L).

Renstra sebagai rencana pembangunan lima tahunan, selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah yang dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus diselaraskan dengan Renstra. Renja yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. RKA SKPD inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA SKPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan Periode 2021–2026 adalah **Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman**. Untuk mewujudkan Visi di atas, maka telah ditetapkan 5 (lima) misi, yakni :

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;**
- 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;**
- 3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;**
- 4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;**
- 5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.**

Dari uraian Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan periode tahun 2021–2026 ini terdapat 9 (Sembilan) Prioritas Wali Kota terpilih yang akan dijalankan, yaitu :

1. Penguatan birokrasi pemerintahan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Pengentasan kemiskinan;
4. Penyediaan air minum yang sehat dan merata;
5. Pengendalian banjir;

6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kondisi sosial yang nyaman;
7. Pengembangan Balikpapan sebagai kota MICE dan Wisata;
8. Pengembangan Balikpapan sebagai kota kreatif; dan
9. Revitalisasi Perusda.

Dari uraian visi dan misi Wali Kota Balikpapan periode tahun 2021–2026 dapat ditelaah dimana 1 (satu) dari 5 (lima) misi yang ada dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan periode Tahun 2021–2026 tersebut sangat relevan atau berkaitan secara eksplisit dengan 2 (dua) urusan yang diamanahkan untuk ditangani oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, terdapat pada misi kedua RPJMD Kota Balikpapan tersebut yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi”.

Dalam upaya mewujudkan Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Periode Tahun 2021–2026 tersebut di atas serta sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan dalam ketentuan dimaksud bahwa pimpinan Perangkat Daerah berkewajiban menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Di samping itu, di dalam diktum kedua Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga ditegaskan tentang kewajiban Pejabat Pemerintah (sampai level eselon II) untuk menyusun/mempunyai rencana strategis tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Ketentuan-ketentuan inilah yang mendasari dan melatarbelakangi penyusunan dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan periode Tahun 2021–2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774)
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum;
15. Peraturan pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kemudian dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
34. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
35. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
36. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

38. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor xx Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
39. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
40. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 40 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan ditetapkan dengan maksud:

1. Menjadi dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
2. Penentuan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
3. Menjadi dasar atau tolok ukur dalam penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Terlaksananya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
3. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan di Balikpapan.
4. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi gambaran pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan yang memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan beserta indikator kerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan mengemban amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan ini memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah. Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan, lembaga harus siap untuk mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau *literature* yang terseleksi dan *up to date*. Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Kearsipan, lembaga harus siap menampung, menyimpan, memelihara serta mengamankan arsip-arsip statis yang memiliki nilai sejarah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, serta tidak kalah pentingnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan sebagai lembaga yang harus memberikan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan penataan kearsipan di Kota Balikpapan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan sesuai dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok di atas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program urusan bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. Pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan bahan pustaka;
4. Pembinaan perpustakaan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan urusan perpustakaan dan kearsipan pada lingkup perangkat daerah dan perpustakaan di lingkungan daerah;
6. Pengelolaaan arsip inaktif dan statis;
7. Pembinaan kearsipan pada pencipta arsip pada tingkat daerah;
8. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dokumen/arsip dan bahan pustaka sebagai warisan budaya;

9. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan arsip pada perangkat daerah;
10. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan bidang perpustakaan dan kearsipan;
11. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas dan fungsi:

1. Menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
2. Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.3. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas:

1. penyusunan program;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. kepegawaian;
4. rumah tangga kantor;
5. perlengkapan;
6. protokol;
7. hubungan masyarakat;
8. layanan informasi dan pengaduan;
9. pembinaan pelayanan publik;
10. kearsipan;
11. surat menyurat; dan
12. evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
2. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
3. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;

4. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
5. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan perpustakaan;
6. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
7. pengelolaan anggaran Dinas;
8. pelaksanaan administrasi keuangan;
9. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
10. pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
12. pengelolaan pengaduan masyarakat;
13. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
14. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
15. pengoordinasian bidang dan UPT;
16. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
17. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Tugas dan Fungsi Bidang Perpustakaan

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perpustakaan, mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja bidang perpustakaan;
2. pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan dan sumber daya manusia;
3. pengendalian pelaksanaan sosialisasi, pemantauan, penerimaan, dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam;
4. perumusan kebijakan teknis karya cetak dan karya rekam;
5. pengendalian pelaksanaan kajian pengembangan perpustakaan dan minat baca;
6. pembinaan profesi sumber daya manusia perpustakaan;
7. pengendalian pelaksanaan pemasyarakatan perpustakaan dan peningkatan minat baca;
8. pengendalian pelaksanaan dan pengembangan kerjasama perpustakaan;
9. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan perpustakaan;

10. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

2.1.5. Tugas dan Fungsi Bidang Kearsipan

Bidang Kearsipan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang kearsipan, mempunyai fungsi:

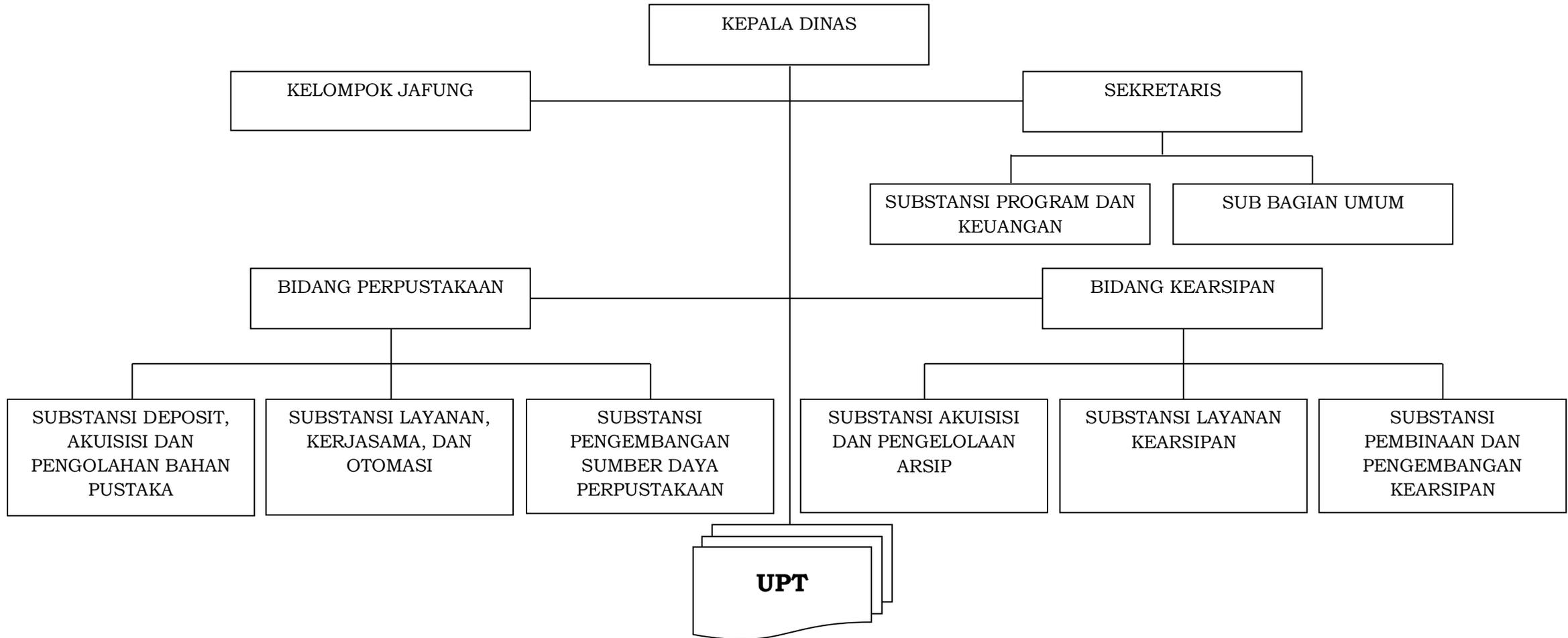
1. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja bidang kearsipan;
2. pembinaan dan pengendalian pelayanan, penilaian, dan penyusutan Arsip Dinamis;
3. pengoordinasian pelaksanaan akuisisi dan pengelolaan arsip dengan Perangkat Daerah lain;
4. pengendalian pengujian autentikasi Arsip Statis dan Arsip media baru;
5. pengoordinasian penyusunan Guide, Daftar Arsip, dan Inventaris Arsip Statis;
6. pengendalian dokumentasi publikasi arsip;
7. pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi, sarasehan, ceramah, diskusi, pameran, bimbingan teknis, dan diklat teknis kearsipan;
8. pengoordinasian penerbitan Naskah Sumber Arsip;
9. pengoordinasian jasa layanan, konsultasi dan diseminasi kearsipan;
10. pengoordinasian pengembangan khasanah arsip;
11. pengoordinasian pengembangan sistem layanan arsip berbasis elektronik dan jaringan informasi integrasi kearsipan;
12. pengendalian pengelolaan perangkat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi;
13. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi berkala akses dan layanan kearsipan;
14. pengoordinasian promosi wisata arsip;
15. pembinaan peningkatan kehandalan Sumber Daya Manusia kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah;
16. pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan di Lembaga Kearsipan Daerah;
17. pengendalian pelaksanaan pengawasan, audit, dan penilaian hasil pengawasan kearsipan;
18. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan penghimpunan dokumentasi naskah perundang-undangan;
19. pengendalian pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian naskah sumber arsip konvensional dan media baru;

20. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip vital;
21. pelaksanaan monitoring penyelenggaraan kearsipan dinamis;
22. pembinaan kearsipan Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi vertikal di Daerah;
23. pembinaan kearsipan lembaga kearsipan Daerah;
24. pelaksanaan kerjasama bidang kearsipan;
25. pembinaan pelaksanaan pengolahan, penataan, pemeliharaan, perawatan, pengamanan, pelestarian, dan pengendalian arsip konvensional dan media baru;
26. pengendalian seleksi naskah sumber arsip yang akan dipublikasikan;
27. pelaksanaan pertimbangan persetujuan pemusnahan arsip;
28. pengoordinasian penerimaan fisik Arsip dan daftar Arsip;
29. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
30. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6. Struktur Organisasi

Gambar Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan berdasarkan Berita Acara Nomor 050/023/Dispustakar tanggal 11 Februari 2021 tentang Rapat Koordinasi Penyelarasan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dalam Penyusunan Uraian Tugas Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan sebagai berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN
BERDASARKAN BERITA ACARA NOMOR 050/023/DISPUSTAKAR TANGGAL 11 FEBRUARI 2021**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 23 orang ASN dan 18 orang Tenaga Non ASN sampai dengan Oktober 2021. Berikut data pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan:

Tabel 2. 1 Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	ASN (orang)		Non ASN (orang)		Jumlah	Keterangan
		L	P	L	P		
1	Pascasarjana/S2	1	0	0	0	1	
2	Sarjana/S1	1	4	0	3	8	
3	Diploma IV	0	0	1	0	1	
4	Diploma III	2	7	1	1	11	
5	Diploma II	0	0	1	0	1	
6	Diploma I	0	0	1	0	1	
7	SLTA	3	5	3	7	18	
	Jumlah	7	16	7	11	41	

Tabel 2. 2 Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah		Keterangan
		L	P	
1	Pembina Tk.I/IVb	1	0	
2	Pembina/IVa	1	0	
3	Penata Tk.I/IIIId	0	4	
4	Penata/IIIc	0	0	
5	Penata Muda Tk.I/IIIb	1	4	
6	Penata Muda/IIIa	0	3	
7	Pengatur Tk.I/IIId	2	3	
8	Pengatur/IIc	2	2	
	Jumlah	7	16	

Tabel 2. 3 Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah		Keterangan
		L	P	
1	Struktural	2	6	
2	Pustakawan	0	1	
3	Arsiparis	1	3	
4	Pranata Komputer	0	1	
5	Fungsional Umum	4	5	
	Jumlah	7	16	

Guna memaksimalkan pelayanan perangkat daerah perlu dukungan SDM yang memadai, dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan tenaga Pustakawan dan Arsiparis secara kuantitatif dan kualitatif dalam menjalankan tugas dan pembinaan pada OPD. Berikut ini adalah kondisi eksisting SDM Disputakar yang dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 4 Kondisi Eksisting SDM Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Per 1 Oktober 2021

No	Jabatan	Ada	Kosong	Keterangan
1	Kepala Dinas		1	Meninggal dunia
2	Sekretaris	1		
3	Eselon III.b			
	1. Kabid Perpustakaan	1		
	2. Kabid Kearsipan	1		
4	Eselon IV.a			
	1. Kasubbag Program dan Keuangan	1		
	2. Kasubag Umum	1		
	3. Kasi Deposit, Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka		1	Meninggal dunia
	4. Kasi Layanan dan Kerjasama	1		
	5. Kasi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	1		
	6. Kasi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	1		
	7. Kasi Layanan Kearsipan		1	Purna tugas
	8. Kasi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan		1	Purna tugas
5	Pustakawan	1		
6	Arsiparis	4		
7	Pranata Komputer	1		
8	Staf ASN	9		
9	Staf Non ASN	18		
	Jumlah	41	4	

2.2.2. Sarana dan Prasarana

2.2.2.1. Ruang Pelayan Perpustakaan

Bangunan Dinas Perpustakaan dan Arsip terdiri atas 5 (lima) lantai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki fasilitas ruangan diperuntukkan bagi kelompok umur, masyarakat umum, dan khusus.

Tabel 2. 5 Ruang Pelayan Perpustakaan

No	Lantai	Nama Ruang	Keterangan
1	I	Ruang Informasi dan Pendaftaran Keanggotaan	
2	I	Ruang Bermain Anak	
3	I	Ruang Laktasi	
4	I	Ruang Diskusi	
5	I	Pojok Braile	
6	I	Mushola	
7	II	Ruang Koleksi Anak	
8	II	Ruang Multimedia dan Internet	
9	II	Migas Corner	

No	Lantai	Nama Ruangan	Keterangan
10	II	Pojok Bank Indonesia dan Pojok Lingkungan Hidup	
11	III	Ruang Koleksi Umum	
12	III	Ruang Koleksi Referensi	
13	III	Ruang Koleksi Konten Lokal	
14	IV	Ruang Terbitan Berkala	
15	IV	Aula	
16	Outdoor	Taman dan Gazebo Literasi	

2.2.2.2. Ruang Pelayan Arsip

Tabel 2. 6 Ruang Pelayan Arsip

No	Lantai	Nama Ruangan	Keterangan
1	Basement	Ruang Transit Arsip	digunakan untuk menerima arsip yang baru dipindahkan/diserahkan
2	Basement	Ruang Pengolahan	Digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengolahan arsip
3	Basement	Ruang Pemusnahan	digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip dan non arsip
4	I	Planning Gallery	ruang pameran arsip foto
5	II	Depo Arsip Inaktif	ruangan penyimpanan arsip inaktif
6	II	Ruang Layanan	digunakan untuk menerima tamu/pengunjung
7	III	Depo Arsip Statis	ruangan penyimpanan arsip statis

2.2.2.3. Asset/Modal

Asset/Modal yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan sampai dengan Desember 2020 sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 2. 7 Asset/Modal yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

No.	Asset yang tersedia	Jumlah/ Luas	Kondisi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
	TANAH					
1	Tanah, Jl. Kapt. Piere Tendean No. 1 Balikpapan	2.348 m ²	2.348 m ²			

**Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2021-2026**

No.	Asset yang tersedia	Jumlah/ Luas	Kondisi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
2	Tanah, Jalan Ruhui Rahayu I Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan	1.030 m ²	1.030 m ²			
3	Tanah, Jl. Lingkungan Pandan Barat - Kel.Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat	848 m ²	848 m ²			
PERALATAN DAN MESIN						
1	Alat angkut roda 4 (empat)	8 unit	7	1		
2	Alat Angkut Roda 2 (dua)	5 unit	5			
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.264 unit	1.180	5	25	54
4	Lift	1 unit		1		
5	Genset	3 unit	2			1
6	Komputer dan peralatan komputer	223 unit	197	6	5	15
7	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	31 unit	26		4	1
8	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4 unit	3	1		
9	Alat Laboratorium	25 unit	20		5	
10	Alat Keamanan lainnya	4 unit	3			1
11	Software	25	25			
GEDUNG DAN BANGUNAN						
1	Gedung Kantor (Perpustakaan dan Kearsipan)	2.086 m ²		2.086 m ²		
2	Gedung Kantor	136.75 m ²		136.75 m ²		
3	Gedung Perpustakaan, Kel. Marga Sari Balikpapan Barat	80 m ²			80 m ²	
4	Taman	2 titik		2 titik		
ASET TETAP LAINNYA						
1	Buku	2.725 Judul	2.725			
INSTALASI						
1	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Besar		Baik			

Sumber: Daftar Aset Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, per 31 Desember 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan target Rencana Strategis periode sebelumnya. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah berdasar Rencana Strategis Perangkat Daerah ditunjukkan pada Tabel T-C.23. yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Rencana Strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Tabel T-C.23. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	-	-	-		5	5,5	2,5	1		25,28	5,6	2,5	-75		505,6	101,82	100	-7466
2	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (1 Aplikasi)	-	-	-		5	20	15	15		8	20	15	10		160	100	100	66,67
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-		90	92	93	94		80,99	81,22	78,83	88,05		89,98	88,28	84,76	93,67

**Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2021-2026**

Tabel T-C.24. 1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Uraian ***)	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angga ran	Realis asi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	10.524.582.123	5.666.226.700	5.372.920.000	6.041.961.000	4.857.941.745	6.444.766.499	3.732.400.845	4.614.676.598	5.108.599.784	3.698.051.971	61,24%	65,87%	85,89	84,55	76,12	-14,33	-10,51
Belanja Tidak Langsung	1.971.789.000	4.204.917.000	4.077.504.000	4.728.193.000	4.763.690.000	1.606.337.351	2.631.949.231	3.914.648.712	4.324.753.084	3.970.153.533	81,47%	62,59%	96	94,47	83,34	19,29	19,84
Jumlah	12.496.371.123	9.871.143.700	9.450.424.000	10.770.154.000	9.621.631.745	8.051.103.850	6.364.350.076	8.529.325.310	9.433.352.868	7.668.205.504	64,43%	64,47%	90,25	87,59	79,69	-5,09	-0,97

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Kendati telah ditetapkan berbagai kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan, tetapi upaya pengembangan perpustakaan dan kearsipan sampai saat ini masih dihadapkan kepada tantangan dan kendala antara lain:

a. Perpustakaan

1. Pertumbuhan berbagai jenis perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan rumah ibadah relatif rendah;
2. Koleksi berbagai jenis perpustakaan masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
3. SDM pengelola perpustakaan terbatas;
4. Eksistensi kelembagaan dan pendanaan perpustakaan daerah sangat tergantung pada Pemerintah Kota;
5. Belum optimalnya layanan perpustakaan daerah;
6. Layanan perpustakaan keliling belum menjangkau ke seluruh wilayah Kota Balikpapan;
7. Kurangnya animo masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan;
8. Perpustakaan digital belum dikenal luas oleh masyarakat;
9. Masih banyak perpustakaan binaan yang belum mengelola perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

b. Kearsipan

1. Lembaga Kearsipan belum dipandang sebagai sumber referensi, informasi, dan penelitian;
2. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
3. Belum optimalnya pemanfaatan arsip sebagai bagian dari audit;
4. Belum terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip;
5. Sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip di instansi pencipta arsip belum terpenuhi sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan;
6. Rendahnya tingkat kesadaran pencipta arsip dalam mengelola dan menyelamatkan arsip.

2.4.2. Peluang

1. Semakin pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan dengan adanya aplikasi otomasi perpustakaan inlislite dan perpustakaan digital iBalikpapan;
3. Adanya potensi sumber pembiayaan dari dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
4. Diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
5. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan penyelenggara negara terhadap pentingnya arsip sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
6. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang autentik;
7. Adanya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
8. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1. Identifikasi permasalahan Perpustakaan

Perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi serta berbasis inklusi sosial memiliki sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perpustakaan di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Permasalahan Perpustakaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pembinaan perpustakaan di kota Balikpapan	Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Bidang Perpustakaan yang berstandar nasional	Kurangnya minat ASN menjadi fungsional pustakawan
			Kurangnya diklat fungsional pustakawan yang diikuti oleh pustakawan
			Kurangnya pemahaman institusi penyelenggara perpustakaan terhadap ketersediaan data profil perpustakaan
		Tata kelola perpustakaan binaan belum optimal	Belum adanya regulasi yang mengatur dan mengikat perpustakaan di Kota Balikpapan
			Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perpustakaan
		Masih rendahnya budaya gemar membaca di masyarakat kota Balikpapan	Masih kurangnya fasilitas pendukung perpustakaan
			Keterbatasan jumlah buku dan ragam koleksi bahan pustaka di perpustakaan
	Belum optimalnya koordinasi dengan para pihak terkait upaya peningkatan gemar membaca masyarakat		
	Belum optimalnya pengelolaan Perpustakaan	Masih rendahnya kemampuan petugas Pengelola perpustakaan sekolah dan kelurahan dalam melakukan pengelolaan perpustakaan	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		sekolah, perpustakaan umum dan khusus	Masih rendahnya perhatian institusi sekolah dan kelurahan dalam pentingnya perpustakaan

3.1.2. Identifikasi Permasalahan Kearsipan

Arsip merupakan rekaman kegiatan/peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tabel 3. 2 Permasalahan Kearsipan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya Penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kearsipan;	Terbatasnya SDM Kearsipan	Kurangnya minat ASN menjadi fungsional arsiparis
			Kurangnya diklat fungsional arsiparis yang diikuti oleh arsiparis
			Kurangnya diklat kearsipan bagi pengelola arsip
			Kurangnya pemahaman pencipta arsip terhadap penyelenggaraan kearsipan
		Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penyimpanan arsip	Belum adanya gedung Depot Arsip yang sesuai dengan standar kearsipan
Tingkat ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah, bahan akuntabilitas serta memori kolektif bangsa	Belum optimalnya pengelolaan arsip		
	Penerapan pengelolaan arsip berbasis digital belum optimal;		

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		masih rendah;	
		Belum adanya regulasi terkait pelayanan perizinan penggunaan arsip	Belum adanya SOP yang ditetapkan

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Balikpapan. Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 Kota Balikpapan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2016 adalah: **“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”**

Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 memiliki makna sebagai berikut:

Kota Terkemuka : Kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, dan udara). Keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota

Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global.

Pengembangan pusat perekonomian baru dalam kawasan Coastal Road, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata dan ekonomi kreatif masyarakat.

Nyaman Dihuni : Nyaman dihuni adalah kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman menandakan kota ini dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai serta berwawasan lingkungan.

Madinatul Iman : Memiliki arti kota yang berperadaban tinggi, nyaman dihuni dengan spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas warga kota. Madinatul Iman juga mengandung makna sebagai suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral dan menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat. Kestabilan masyarakat mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundanganundangan, dan menjadi tatanan masyarakat yang

beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju. Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung pemerintahan yang baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan. Madinatul Iman juga dapat diartikan sebagai kota berperadaban maju dan modern, hidup sejahtera dan bahagia, dalam nuansa kota beriman dengan mewujudkan masyarakat beriman, bertaqwa, beramal shaleh, berbudaya, taat hukum, bermoral dan berakhlak mulia serta membangun masyarakat yang berprestasi, pekerja keras, kreatif, inovatif, mandiri dan menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, indah aman dan nyaman.

Dalam rangka pencapaian visi di atas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
- Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
- Misi 3 : Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
- Misi 4 : Mewujudkan kota yang nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
- Misi 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke-2, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Dalam rangka mendukung misi Wali Kota, maka tujuan pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

- Tujuan 1 : Meningkatkan profesionalitas dan transparansi birokrasi;
- Tujuan 2 : Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing;
- Tujuan 3 : Meningkatkan kinerja layanan infrastruktur perkotaan;
- Tujuan 4 : Mewujudkan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan;
- Tujuan 5 : Terciptanya pembangunan ekonomi inklusif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan ke-2, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing.

Dalam rangka mendukung tujuan Wali Kota, maka sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
- Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
- Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas literasi masyarakat;
- Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis pengarusutamaan gender;
- Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pemuda;
- Sasaran 6 : Meningkatnya kelestarian warisan budaya daerah;

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran ke-3, yaitu meningkatnya kualitas literasi masyarakat. Dari visi dan misi dimaksud, dijabarkan dalam 9 (sembilan) prioritas kepala daerah terpilih, yakni:

1. Penguatan birokrasi pemerintahan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Pengentasan kemiskinan;
4. Penyediaan air minum yang sehat dan merata;
5. Pengendalian banjir;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kondisi sosial yang nyaman;
7. Pengembangan Balikpapan sebagai kota MICE dan Wisata;
8. Pengembangan Balikpapan sebagai kota kreatif; dan
9. Revitalisasi Perusda.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian agenda prioritas kepala daerah khususnya agenda prioritas nomor 2 (dua) yaitu Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Analisis permasalahan, faktor pendorong, dan faktor penghambat pelayanan perangkat daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3. 3 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Misi ke-2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi</p> <p>Tujuan: Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing.</p> <p>Sasaran: Meningkatnya kualitas literasi masyarakat.</p>	Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Bidang Perpustakaan yang berstandar nasional	Kurangnya minat ASN menjadi fungsional pustakawan	Penjaringan tenaga fungsional pustakawan melalui <i>inpassing</i>
			Kurangnya diklat fungsional pustakawan yang diikuti oleh pustakawan	Dilaksanakannya diklat-diklat pustakawan oleh Perpusnas
			Kurangnya pemahaman institusi penyelenggara perpustakaan terhadap ketersediaan data profil perpustakaan	Penyelenggaraan sosialisasi dan rapat koordinasi pengelola perpustakaan yang dilaksanakan secara rutin

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tata kelola perpustakaan binaan belum optimal	Belum adanya regulasi yang mengatur dan mengikat perpustakaan di Kota Balikpapan	Adanya penilaian akreditasi perpustakaan mendorong peningkatan pengelolaan perpustakaan
			Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perpustakaan	Tuntutan masyarakat akan layanan yang lebih cepat dan efisien
		Masih rendahnya budaya gemar membaca di masyarakat kota Balikpapan	Masih kurangnya fasilitas pendukung perpustakaan	Adanya potensi sumber pembiayaan lain yaitu sumbangan masyarakat dan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>
			Keterbatasan jumlah buku dan ragam koleksi bahan pustaka di perpustakaan	

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Belum optimalnya koordinasi dengan para pihak terkait upaya peningkatan gemar membaca masyarakat	Masih adanya peluang kerjasama dengan masyarakat penggerak literasi
		Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan sekolah, perpustakaan umum dan khusus	Masih rendahnya kemampuan petugas pengelola perpustakaan sekolah dan kelurahan dalam melakukan pengelolaan perpustakaan	Dilaksanakannya bimbingan teknis pengelola perpustakaan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
			Masih rendahnya perhatian institusi sekolah dan kelurahan dalam pentingnya perpustakaan	Penyelenggaraan lomba pengelolaan perpustakaan

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Terbatasnya SDM Kearsipan	Kurangnya minat ASN menjadi fungsional arsiparis	Penjaringan tenaga fungsional arsiparis
			Kurangnya diklat fungsional arsiparis yang diikuti oleh arsiparis	Dilaksanakannya diklat fungsional arsiparis oleh ANRI
			Kurangnya diklat kearsipan bagi pengelola arsip	Dilaksanakannya diklat pengelola arsip oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
			Kurangnya pemahaman pencipta arsip terhadap penyelenggaraan kearsipan	Tingginya kebutuhan akan informasi arsip dalam rangka memudahkan pelayanan pada masyarakat

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penyimpanan arsip	Belum adanya gedung Depot Arsip yang sesuai dengan standar kearsipan	Depot arsip dalam tahap perencanaan pembangunan
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah, bahan akuntabilitas serta memori kolektif bangsa masih rendah;	Belum optimalnya pengelolaan arsip	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan
		Belum adanya regulasi terkait pelayanan perizinan penggunaan arsip	Penerapan pengelolaan arsip berbasis digital belum optimal;	
			Belum adanya SOP Kearsipan yang ditetapkan	

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1.1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Visi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan Visi Presiden periode 2020-2024, yaitu: **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi”**.

Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu agenda ke-4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Maka Perpustakaan Nasional merumuskan Misi: **“Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara”**.

Dalam dokumen Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 juga ditetapkan sasaran strategis yaitu **“Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca”**, dengan indikator:

- Nilai kegemaran membaca dari 53,84 (Baseline 2019) menjadi 71,30 tahun 2024.
- Indeks pembangunan literasi masyarakat dari 10,2 (Baseline 2019) menjadi 15,00 tahun 2024.

3.3.1.2. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Dalam urusan Bidang Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan berpedoman kepada dokumen Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2020-2024, yang di dalamnya terdapat visi ANRI yaitu **“Menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melakukan pelayanan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden”**.

Visi tersebut ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Dalam dokumen Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2020-2024 terdapat sasaran strategis ANRI, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan;
2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional;
3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima;
4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI.

Tabel 3. 4 Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Perpustakaan Nasional RI			
1	Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat Ketercukupan Koleksi	Keterbatasan anggaran	Adanya potensi pembiayaan yang bersumber dari CSR
		Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Masih rendahnya minat ASN untuk masuk ke dalam jabatan fungsional Pustakawan	Dilaksanakannya diklat-diklat Pustakawan dan tenaga pengelola Perpustakaan, serta penjangkaran tenaga fungsional melalui inpassing
		Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan digital (iBalikpapan)	Kurangnya sosialisasi	Pemanfaatan media social untuk mempromosikan iBalikpapan kepada masyarakat
	Arsip Nasional RI			
1	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Tingkat kepatuhan para penyelenggara kearsipan	Masih rendahnya tingkat kepatuhan para penyelenggara kearsipan terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan	Pelaksanaan pengawasan Kearsipan di Pemerintah Daerah
2	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh,	Tingkat ketersediaan arsip	Peran arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa kurang optimal	Preservasi arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	dan terpercaya secara nasional			
3	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Tingkat kualitas pelayanan informasi kearsipan	Kualitas pelayanan kearsipan kepada publik masih rendah	Telah dibangunnya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
4	Terwujudnya tata kelola yang mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	Indeks reformasi birokrasi	-	-

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 yaitu **“Berdaulat mewujudkan budaya baca dan sadar tertib arsip di Kalimantan Timur”**. Adapun misinya adalah **“Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Dan Sadar Tertib Arsip Di Kalimantan Timur”**.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

- A. Meningkatkan sumber daya perpustakaan di Kalimantan Timur, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas SDM, kuantitas sarana prasarana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu
- B. Meningkatkan pengembangan, pendayagunaan dan pelestarian bahan perpustakaan dengan sasaran terukur meliputi:
 1. Jumlah Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan (alih media)
 2. Jumlah Bahan Perpustakaan Yang dilestarikan
- C. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat di Kalimantan Timur, dengan sasaran terukur meliputi:
 1. Jumlah Masyarakat yang Mendayagunakan Perpustakaan
 2. Skor Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpustakaan

3. Produk Perjanjian Kerjasama Perpustakaan yg dihasilkan
- D. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kualitas tenaga perpustakaan dengan sasaran terukur meliputi:
1. Jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan
 2. Jumlah tenaga fungsional dan tenaga perpustakaan yg dibina dan dikembangkan
 3. Jumlah kegiatan pembudayaan gemar membaca
- E. Meningkatkan SDM pengelola kearsipan dan sistem administrasi kearsipan yang berkualitas di Kalimantan Timur, dengan sasaran terukur meliputi :
1. Jumlah OPD/Institusi yang dilakukan pengawasan
- F. Meningkatkan upaya penyelamatan, pelestarian dan pendayagunaan arsip yang bernilai guna, dengan sasaran terukur meliputi :
1. Jumlah akuisis dan pengolahan arsip

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032 urusan yang dikerjakan/tugas oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak berkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, komprehensif dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan dan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip walaupun tidak berkaitan langsung tetapi secara tidak langsung ada beberapa hal yang patut yang menjadi prioritas utama yaitu:

1. Perkembangan literasi dan pendidikan masyarakat perlu adanya kerjasama dan koordinasi dalam bidang perpustakaan dengan OPD terkait, lembaga pendidikan swasta, kecamatan dan kelurahan. Pengembangan perpustakaan perlu menjadi salah satu prioritas guna meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat serta untuk

mendapatkan informasi tentang perkembangan informasi dan teknologi khususnya di Kota Balikpapan.

2. Pembangunan unit jaringan layanan perpustakaan di tiap kecamatan, kelurahan, sekolah, lembaga khusus dan perguruan tinggi.
3. Dengan banyaknya OPD di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan yang perlu diakuisi arsip statisnya, maka perlu dibangun gedung depot arsip yang memenuhi standar.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang.

Isu isu strategis yang akan muncul di antaranya adalah:

1. Pembudayaan Minat Baca Masyarakat

Budaya suatu bangsa terbangun selaras dengan budaya literasi masyarakatnya. Faktor kebudayaan dan peradaban dipengaruhi oleh proses membaca hasil karya peradikindia yang terekam dalam tulisan yang merupakan warisan yang sangat berguna bagi proses kehidupan sosial yang dinamis. Salah satu indikator suatu negara maju ditandai dengan masyarakatnya yang suka dan gemar membaca, karena dengan membaca maka ilmu pengetahuan dapat dikuasai. Sebagai bagian dari upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Balikpapan sebagaimana tercantum pada misi kedua RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan berperan penting dalam pembudayaan minat baca masyarakat.

2. Sadar Tertib Arsip

Sadar tertib arsip dalam rangka peningkatan kesadaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mewujudkan tata kelola kearsipan yang baik serta mendukung program nasional gerakan sadar tertib arsip nasional, perlu dilakukan upaya sadar tertib arsip melalui gerakan sadar tertib arsip di Kota Balikpapan. Strategi utama gerakan sadar tertib arsip adalah: 1) menjadikan tertib arsip sebagai salah satu bagian penting untuk menjadi perhatian OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan 2) peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya kearsipan yang terdapat pada OPD; dan 3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, penyediaan sumber daya

pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan yang mendukung perilaku sadar tertib.

**Tabel 3. 5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas
Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
			INTERNAL (KEWENANGAN Organisasi Perangkat Daerah)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN Organisasi Perangkat Daerah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan publik / pelayanan prima layanan perpustakaan	Fasilitas dan prasarana peralatan dan perlengkapan perpustakaan yang belum memadai	Standar dan syarat ruang layanan dari perpustakaan nasional RI	Sarana dan prasarana, anggaran, dan SDM	Kebijakan anggaran yang diberikan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah	1. Rendahnya SDM di bidang pelayanan 2. Terbatasnya sarana dan prasarana 3. Terbatasnya anggaran yang tersedia
Pelayanan publik / Pelayanan prima layanan kearsipan	Pelayanan belum optimal, karena belum ada gedung kearsipan yang memenuhi standar minimal dan terbatasnya jumlah SDM kearsipan	Standar dan syarat ruang layanan dari Arsip Nasional RI, yaitu berupa keputusan kepala ANRI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Standar Minimal Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip in	Sarana dan prasarana, anggaran, dan SDM	Perhatian dan arah kebijakan yang mendukung optimalisasi penyelenggaraan kearsipan, termasuk dalam hal anggaran yang diberikan terhadap Organisasi Perangkat Daerah	1. Gedung pelayanan yang belum tersedia 2. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM 3. Terbatasnya anggaran yang tersedia

**Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2021-2026**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
			INTERNAL (KEWENANGAN Organisasi Perangkat Daerah)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN Organisasi Perangkat Daerah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		aktif dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip			
Peningkatan budaya literasi	Koleksi perpustakaan kurang beragam	Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Koleksi buku, SDM, sarana dan prasarana	Kebijakan anggaran pemerintah kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana dan prasarana 2. Terbatasnya anggaran yang tersedia 3. Terbatasnya jejaring perpustakaan
Peningkatan budaya sadar arsip	Rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang arti penting arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan	Perka ANRI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip	SDM, prasarana dan sarana	Kebijakan umum dan Kebijakan anggaran	Gedung depot belum ada, Anggaran terbatas, SDM kurang, sarana, dan sebagainya

**Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2021-2026**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
			INTERNAL (KEWENANGAN Organisasi Perangkat Daerah)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN Organisasi Perangkat Daerah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Keterbukaan informasi dan komunikasi Bidang Kearsipan	Belum optimalnya keterbukaan informasi tentang penyelenggaraan kearsipan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	SDM, sarana dan peralatan	Kebijakan daerah dan komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah	Belum tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak
Manajemen Tata Kelola Kearsipan	Belum terlaksananya tata kelola kearsipan di Organisasi Perangkat Daerah dan Nagari sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan UU 43 tahun 2009 dan turunannya	Kesiapan SDM, anggaran, sarana prasarana	Kebijakan daerah serta komitmen pimpinan dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah	Ketersediaan sarana prasarana, kuantitas dan kualitas SDM

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Arsip

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel T-C.25. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas literasi masyarakat	Meningkatnya layanan kearsipan sesuai standar	Nilai pengawasan kearsipan	90,10	90,20	90,30	90,40	90,50
		Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan	Persentase peningkatan layanan Perpustakaan	10	10	10	10	10
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	SAKIP OPD	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD periode 2016-2021 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan periode berkenaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel T-C.26. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :			
Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman			
MISI II : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas literasi masyarakat	1. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan	1. Pembinaan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP); 2. Mengedukasi masyarakat untuk gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan 3. Pengembangan produk layanan dengan pemanfaatan teknologi informasi; 4. Pengembangan dan pengelolaan koleksi bahan pustaka;

**Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2021-2026**

		2. Pengelolaan arsip 3. Perlindungan dan penyelamatan arsip	5. Pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis 6. Pembinaan dan pengawasan kearsipan 7. Akuisisi arsip statis
--	--	--	--

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam T-C.27. Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah.

Berikut ini ditampilkan matrik program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk tahun 2021-2026 yang disertai kebutuhan dana / pagu indikatif.

Tabel T-C.27. 1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Balikpapan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya kualitas literasi masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	27,00		28,75		30,50		32,25		34,00		34,00	
		X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai	N/A	78	8,378,538,375	79	8,746,797,273	80	10,052,431,562	81	11,110,534,092	82	12,377,719,629	82	50,666,020,931
		X.XX.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	65,96	70,00	50,000,000	72,00		74,00		76,00		78,00		78	50,000,000
		X.XX.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	82	83	4,607,003,375	84	4,800,000,000	85	4,920,000,000	86	5,043,000,000	87	5,169,075,000	87	24,539,078,375
		X.XX.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	76	77		78		79		80		81		81	
		X.XX.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	79	80		81	128,000,000	82	189,600,000	83	150,000,000	84	300,000,000	84	767,600,000
		X.XX.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	75	76	578,000,000	77	448,797,273	78	653,651,562	79	864,821,780	80	1,183,000,000	80	3,728,270,615

**Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	76	77		78	25,000,000	79	296,000,000	80	750,000,000	81	700,000,000	81	1,771,000,000
		X.XX.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	78	79	2,293,535,000	80	2,555,000,000	81	2,884,100,000	82	3,172,510,000	83	3,489,761,000	83	14,394,906,000
		X.XX.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	75	76	850,000,000	77	790,000,000	78	1,109,080,000	79	1,130,202,312	80	1,535,883,629	80	5,415,165,941
	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan			Persentase Peningkatan layanan Perpustakaan	Persen	10	10		10		10		10		10		10	
		2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
		2.23.2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar nasional	%	3	4	1,055,000,000	5	1,101,370,037	6	1,265,771,525	7	1,399,004,569	8	1,558,564,707	8	6,379,710,839
		2.23.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah	%	-33	10	855,000,000	12	871,370,037	14	1,043,771,525	16	1,039,004,569	18	1,208,564,707	18	5,017,710,839

**Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Meningkatnya Layanan Kearsipan sesuai standar		2.23.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah	%	11%	11.5	200,000,000	12	230,000,000	13	222,000,000	14	360,000,000	15	350,000,000	15	1,362,000,000	
				Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	90,00	90,10		90,20		90,30		90,40		90,50		90,50		
		2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
		2.24.2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip yang dikelola	%	57	60	320,000,000	70	334,064,845	80	383,930,700	90	424,342,618	100	472,740,006	100	1,935,078,169	
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis	%	28	42	210,000,000	55	210,000,000	70	253,930,700	83	274,342,618	100	342,740,006	100	1,291,013,324	
		2.24.2.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase arsip statis yang dikelola	%	72.18	75	50,000,000	80	64,064,845	85	70,000,000	90	90,000,000	100	70,000,000	100	344,064,845	
		2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN	%	100	100	60,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000	100	300,000,000	
		2.24.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan	%	46	55	160,000,000	65	167,032,423	75	191,965,350	85	212,171,309	100	236,370,003	100	967,539,085	
		2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip	%	0	6	40,000,000	8	27,032,423	11	31,965,350	14	36,171,309	17	50,370,003	17	185,539,085	

**Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	%	0	10	20,000,000	20	20,000,000	40	30,000,000	60	36,000,000	100	40,000,000	100	146,000,000
		2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi	%	0	15	50,000,000	30	50,000,000	45	50,000,000	60	50,000,000	85	50,000,000	85	250,000,000
		2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang	%	0	5	50,000,000	10	70,000,000	15	80,000,000	20	90,000,000	25	96,000,000	25	386,000,000
		2.24.4.	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase perizinan penggunaan arsip	%	0	0	40,000,000	0	41,758,106	100	47,991,337	100	53,042,827	100	59,092,501	100	241,884,771
		2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Presentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	0	10	40,000,000	20	41,758,106	30	47,991,337	40	53,042,827	50	59,092,501	50	241,884,771
TOTAL								9,953,538,375		10,391,022,684		11,942,090,474		13,199,095,415		14,704,486,846		60,190,233,795

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel T-C.28. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan								
1	Indeks Pembangunan literasi masyarakat	20,78	20,80	20,81	20,82	20,83	20,84	20,84
2	Presentase Peningkatan layanan perpustakaan	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	27,00	28,75	30,50	32,32	34,00	24,00
4	Presentase Perpustakaan yang memenuhi standar nasional	3%	4%	5%	6%	7%	8%	8%
5	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) internal perangkat daerah	N/A	78	79	80	81	82	82
6	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	71,88	72,00	72,05	72,10	72,15	72,20	72,20
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan								
1	Nilai Pengawasan Kearsipan	90,00	90,10	90,20	90,30	90,40	90,50	90,50
2	Presentase arsip yang dikelola	10	10	10	10	10	10	10

**Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Presentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan	46%	50%	70%	80%	90%	100%	100%
4	Presentase perizinan penggunaan arsip	0	0	0	100	100	100	100
5	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	40	45	50	55	60	65	65
6	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	0	20	30	40	50	60	60

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan (Dispustakar) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang memuat penjabaran target capaian Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan mendukung Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan Periode Tahun 2021-2026.

Renstra ini merupakan pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang perpustakaan dan kearsipan dan kesekretariatan, untuk itu dibutuhkan kerja keras, profesionalismen, komitmen, integritas, dedikasi yang tinggi dengan semangat kebersamaan, harmoni dan sinergi dari segenap pegawai di lingkungan Dispustakar untuk mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Kami menyadari Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan ini masih jauh dari kesempurnaan, terdapat kesalahan dan kekurangan sehingga saran dan kritik sangat diharapkan untuk menjadi bahan evaluasi bagi penyusunan Renstra yang akan datang.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini. Semoga Renstra ini tidak hanya dipergunakan sebagai acuan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tetapi juga bermanfaat sebagai informasi bagi perangkat daerah lainnya serta masyarakat Kota Balikpapan pada umumnya.

Balikpapan, 2 Desember 2021
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kota Balikpapan,



HASANUDDIN
Pembina Tingkat I